

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratis dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah, demokratisasi dalam berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara UU No. 33 tahun 2004.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan sebab yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Sesuai UU No. 32 tahun 2004, berkaitan dengan otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data atau informasi keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Informasi keuangan yang dimaksud adalah berupa penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagai salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana

Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa kepala daerah harus memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan. Dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh peraturan kepala daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan. Wujud dari keterbatasan tersebut dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagian besar wajar dengan pengecualian (Suwarno, 2007: 2).

Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sesuai PP No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, juga perlu dilakukan penelitian apakah Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pembelian Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 148).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemda masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemda dapat diketahui bagaimana kinerja pemda yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemda sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Pratomo dan Harjito (2007) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2001 sampai 2006. Penelitian tersebut membuktikan bahwa jika dilihat dari indikator kinerja PAD kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Utara mengalami pertumbuhan PAD yang positif tetapi relatif masih kecil peranannya dalam struktur APBD dan dari

peta kemampuan keuangan, mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009-2011”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi dalam memperoleh PAD di Kota Surakarta ?
3. Bagaimana tingkat aktivitas atau keserasian keuangan daerah di Kota Surakarta ?
4. Bagaimana tingkat Pertumbuhan keuangan daerah di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio kemandirian.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efektivitas dan efisiensi.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio aktivitas.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio pertumbuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis keuangan daerah di Kota Surakarta.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan dan mengevaluasi kinerja keuangan serta dapat dijadikan bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah serta dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

E. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah, dan tinjauan peneliti terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah (DPD) Kota Surakarta dan hasil analisis rasio.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran.